

## RINGKASAN

R. Adi Soeprijanto, Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Pelaksanaan Pelayanan Oleh Tenaga Kefarmasian Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Studi di Puskesmas Kabupaten Purbalingga), Pembimbing 1 : Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D., Pembimbing 2 : Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H.

Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan obat. Jumlah apoteker yang terbatas, salah pemberian obat, ketersediaan obat, dan kepastian hukum apoteker kontrak merupakan faktor penghambat pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

Penelitian ini berbentuk yuridis normatif-empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder berupa studi pustaka berbentuk bahan hukum sekunder sedangkan data primer berupa observasi dan wawancara berbentuk bahan hukum primer.

Hasil penelitian menunjukkan apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di Puskesmas, baik farmasi klinik maupun pengelolaan obat. Kekurangan obat terjadi karena stok dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang kosong dan adanya obat kadaluwarsa berasal dari *buffer stock* provinsi. Teknis pelaksanaan pelayanan kefarmasian menggunakan pedoman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan tenaga kontrak oleh pihak yang tidak berwenang menyebabkan terjadinya pelanggaran administrasi. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) merupakan dasar kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.

Kata kunci : Pelayanan Kefarmasian, Puskesmas, Tenaga Kefarmasian.

## **SUMMARY**

*R. Adi Soeprijanto, Master of Law Post Graduate Program in the Faculty of Law, University of General Soedirman, The Implementation of Service by Pharmacist Based on Regulation Minister of Health Republic Indonesia Number 30 in 2014 about The Standard of Pharmaceutical Service at Public Health Center (Study at Public Health Center of Purbalingga), Supervisor : Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. Co-Supervisor : Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H.*

*Pharmaceutical service is an integrated activity with a view to identifying, preventing, and resolving drug related issues. Limited number of pharmacist, misappropriation of drugs, availability of drugs and legal certainty of contract pharmacist are inhibiting factors of pharmaceutical services at Public Health Center.*

*This research is in the form of juridical normative-empirical by using secondary and primary data. Secondary data source from library study as secondary legal materials and primary data source from observation and interview as primary legal material.*

*The results showed pharmacist is responsible for pharmaceutical services in Public Health Center, both clinical pharmacy and drug management. Drug shortages occur because the stock is empty from district health office and the presence of expired drugs comes from provincial stock buffer. Technical implementation of pharmaceutical service using guidelines in accordance with legislation. Appointment of contract worker by unauthorized persons caused administrative violations. Registration certificate and practice license are the basic of legal certainty for pharmacist.*

*Key words : Pharmaceutical Service, Public Health Center, Pharmacist.*